

ABSTRAK

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia pada akhir tahun 2023 telah disambut dengan resistensi intensif dari publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di ruang digital maupun di lapangan. Hal ini telah menghalangi pengungsi mendapatkan hak perlindungan dan menghambat kerja-kerja kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis gerakan penolakan ini menggunakan teori proses politik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks struktural yang mendorong gerakan tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis proses perubahan sikap ini adalah *process-tracing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan rezim perlindungan pengungsi di tingkat global, regional (Asia Tenggara), dan nasional (Indonesia) dalam membangun mekanisme perlindungan pengungsi yang holistik telah berkontribusi dalam mendorong kemunculan gerakan penolakan masyarakat ini. Studi ini telah berkontribusi dalam pengembangan teori proses politik dan memperkaya studi kebijakan pengelolaan pengungsi.

Kata kunci: Rohingya, pengungsi, sentimen, rezim perlindungan pengungsi, teori proses politik, Indonesia.

ABSTRACT

The arrival of Rohingya refugees in Indonesia in late 2023 has been met with unprecedented public resistance, both in the digital space and on the ground. This resistance has prevented refugees from obtaining protection rights and hampered humanitarian work. This study analyzes this rejection movement using political process theory to gain a deep understanding of the structural context that drives this movement. The method used to analyze this attitude change process is process tracing. The study results show that the failure of refugee protection regimes at the global, regional (Southeast Asia), and national (Indonesia) levels in building a holistic refugee protection mechanism has contributed to the emergence of this public rejection movement. This study has contributed to developing political process theory and enriched studies on refugee governance policies.

Keywords: Rohingya, refugees, sentiment, refugee protection regime, political process theory, Indonesia.